

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi pada hakekatnya adalah suatu proses perbaikan yang berkesinambungan dari suatu masyarakat atau sistem sosial secara keseluruhan menuju kehidupan yang lebih baik, di mana proses pembangunan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup kesejahteraan rakyat serta harkat dan martabat manusia yang meliputi peningkatan berbagai barang kebutuhan pokok, peningkatan standar hidup serta perluasan pilihan ekonomi dan sosial bagi seluruh masyarakat (Todaro dan Smith, 2003:28).

Salah satu tolak ukur penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan suatu dampak nyata dari kebijakan pembangunan yang dilaksanakan. Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Menurut Sukirno (2002:415) dalam analisis makro menyatakan, bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai suatu Negara diukur dari perkembangan pendapatan riil yang dicapai suatu Negara.

Pembangunan ekonomi suatu Negara memerlukan suatu proses yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan berbagai strategi dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah

pusat dan pemerintah daerah. Strategi dan kebijakan dari pemerintah dalam pembangunan ekonomi dapat dinyatakan berhasil jika terjadi pertumbuhan ekonomi yang diiringi dengan tenaga kerja yang semakin meningkat sehingga menyebabkan berkurangnya tingkat pengangguran.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Pertumbuhan ekonomi akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu, karena pada dasarnya aktifitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Proses ini akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki masyarakat. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka diharapkan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi juga akan meningkat.

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang (Boediono, 2012:1). Pertumbuhan ekonomi juga mendorong peningkatan aktivitas ekonomi yang ditujukan dengan peningkatan produksi barang dan jasa dalam suatu waktu yang dapat mendorong kegiatan ekonomi sehingga menciptakan lapangan pekerjaan dalam jangka yang panjang.

Pertumbuhan ekonomi merupakan syarat yang diperlukan dalam melaksanakan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan juga merupakan ukuran utama dalam keberhasilan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi perkembangan suatu perekonomian dari suatu periode ke periode berikutnya. Kemampuan suatu Negara untuk menghasilkan barang dan jasa

akan meningkat, yang disebabkan oleh faktor-faktor yang selalu mengalami pertambahan dalam jumlah dan kualitasnya.

Indikator yang digunakan untuk menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan produk nasional, seperti Produk Domestik Bruto (PDB) untuk tingkat nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota. Peningkatan pertumbuhan ekonomi selalu diikuti oleh pembangunan ekonomi yang meningkat pula. Untuk melihat pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat dapat dilihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1
Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Barat
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2010 – 2013

KAB / KOTA	Tahun				Rata-rata
	2010	2011	2012	2013	
Kab Sambas	5,79	5,80	5,88	5,99	5,87
Kab Bengkayang	4,63	5,65	5,74	6,04	5,52
Kab Landak	5,13	6,90	6,03	6,21	6,07
Kab Pontianak	2,13	4,86	3,54	5,08	3,90
Kab Sanggau	4,15	4,61	5,92	6,04	5,18
Kab Ketapang	7,51	7,98	5,01	6,97	6,87
Kab Sintang	5,19	5,45	5,82	6,34	5,70
Kab Kapuas Hulu	4,44	4,56	5,61	6,01	5,16
Kab Sekadau	5,85	5,73	5,95	6,71	6,06
Kab Melawi	5,75	6,54	6,58	6,73	6,40
Kab Kayong Utara	5,92	5,93	6,01	6,00	5,97
Kab Kubu Raya	6,23	6,51	6,69	6,79	6,56
Kota Pontianak	5,39	5,88	6,07	6,91	6,06
Kota Singkawang	5,54	6,64	6,18	6,36	6,18
Kalimantan Barat	5,26	5,93	5,79	6,30	5,82

Sumber: BPS Kal-Bar Dalam Angka Tahun 2010-2013

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 rata-rata pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat selama empat tahun terakhir adalah sebesar 5,82 persen per tahun. Rata – rata pertumbuhan ekonomi terendah terdapat pada Kabupaten Pontianak sebesar 3,90 persen per tahun dan rata –rata pertumbuhan ekonomi tertinggi terdapat pada Kabupaten Ketapang sebesar 6,87 persen per tahun. Besarnya kenaikan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ketapang bahkan lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat. Rendahnya rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pontianak mungkin disebabkan kurangnya mengoptimalkan sumber daya alam yang tersedia, dan rata-rata tingkat pertumbuhan yang tertinggi di Kabupaten Ketapang karena memiliki sumber daya alam yang banyak serta mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada tersebut.

Kebijakan pemerintah yang secara langsung dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah pengeluaran atau belanja pemerintah karena variabel ini diwujudkan dalam bentuk pembangunan sarana ekonomi dan sosial. Belanja atau pengeluaran daerah berperan sebagai modal awal dalam perekonomian suatu daerah maupun Negara yang mana pengeluaran atau belanja pemerintah secara praktis akan mempengaruhi aktivitas perekonomian, bukan hanya karena pengeluaran atau belanja pemerintah dapat menciptakan proses pembangunan, namun juga merupakan salah satu komponen agregat demand yang dapat menambah produk domestik, dengan kata lain besaran yang dikeluarkan berpengaruh terhadap pertumbuhan

ekonomi disuatu Negara atau Daerah. Menurut Undang – Undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau Kabupaten/Kota, yang terdiri dari urusan wajib dan pilihan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang -undangan. Semakin besar pengeluaran daerah yang produktif maka semakin tinggi tingkat perekonomian suatu daerah. Untuk melihat jumlah belanja daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat dapat dilihat pada tabel 1.2

Tabel 1.2
Realisasi Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Berdasarkan Kab/Kota Tahun 2010-2013 (Juta Rupiah)

Kabupaten/Kota	Tahun				Rata-rata
	2010	2011	2012	2013	
Kab Sambas	670.233,88	830.103,44	915.550,38	1.046.131,05	865.504,69
Kab Bengkayang	473.159,61	528.916,47	555.975,01	731.889,54	572.485,16
Kab Landak	543.100,35	596.810,07	706.893,19	895.496,72	685.575,09
Kab Pontianak	406.616,18	469.748,90	544.200,53	604.421,65	506.246,81
Kab Sanggau	628.932,30	783.934,69	888.953,58	1.032.777,78	833.649,59
Kab Ketapang	767.465,22	939.375,08	1.026.366,25	1.202.764,21	983.992,69
Kab Sintang	705.450,87	806.254,94	932.088,32	1.063.798,63	876.898,19
Kab Kapuas Hulu	689.649,99	817.434,27	897.619,27	1.019.977,22	856.170,19
Kab Sekadau	374.986,07	412.379,30	496.528,94	584.916,32	467.202,66
Kab Melawi	433.935,54	479.224,89	566.801,23	690.995,27	542.739,23
Kab Kayong Utara	327.988,67	390.840,57	452.260,40	527.247,01	424.584,16
Kab Kubu Raya	567.104,46	756.356,59	837.272,05	934.478,40	773.802,88
Kota Pontianak	764.417,76	862.195,04	1.015.614,34	1.321.925,77	991.038,23
Kota Singkawang	445.227,54	491.203,92	540.924,05	715.068,37	548.105,97
Kalimantan Barat	7.798.268,43	9.164.778,17	10.377.047,55	12.371.887,95	9.927.995,52

Sumber: DJPK Republik Indonesia Tahun 2010-2013

Berdasarkan tabel 1.2 menunjukkan bahwa pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 rata-rata belanja daerah Kalimantan Barat selama empat tahun terakhir adalah sebesar 9.927.995,52 juta rupiah per tahun. Rata-rata belanja daerah tertinggi terdapat pada Kota Pontianak sebesar 991.038,23 juta rupiah per tahun dan rata-rata belanja daerah terendah terdapat pada Kabupaten Kayong Utara sebesar 424.584,16 juta rupiah per tahun. Tingginya rata-rata belanja daerah Kota Pontianak mungkin disebabkan terus meningkatnya belanja langsung, pengelolaannya standar dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Rendahnya rata-rata belanja daerah Kabupaten Kayong Utara mungkin disebabkan kurang mandiri dalam pengelolaan keuangan daerah, belanja langsung yang masih relatif rendah sehingga dalam memberikan manfaat kepada masyarakat masih dirasakan sangat kurang.

Dalam perkembangan ekonomi yang pesat, belum bisa menjamin bahwa suatu daerah itu dikatakan makmur, jika tidak diikuti dengan perluasan lapangan pekerjaan untuk menampung tenaga kerja yang baru setiap tahunnya. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan perluasan kesempatan kerja, karena faktor produksi tenaga kerja merupakan faktor penting bagi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan penduduk dan hal-hal yang berhubungan dengan kenaikan jumlah tenaga kerja secara tradisional dianggap sebagai faktor yang positif dan merangsang pertumbuhan ekonomi, artinya semakin banyak penduduk, maka akan menambah jumlah produksi komoditi sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Todaro, 2000:19).

Dalam pertumbuhan ekonomi suatu Negara atau daerah, tenaga kerja memberikan andil yang besar dalam pertumbuhan ekonomi. Jumlah penduduk adalah salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi disuatu wilayah. Jumlah penduduk yang bertambah dari waktu ke waktu dapat menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi bila tidak diimbangi dengan peningkatan produksi, namun disisi lain penduduk yang bertambah akan menambah jumlah tenaga kerja, dan penambahan tersebut memungkinkan suatu daerah untuk menambah produksi. Jika penambahan jumlah penduduk tidak seimbang dengan faktor produksi lain yang juga terjadi penambahan tenaga kerja, maka tidak akan menimbulkan penambahan dalam tingkat produksi. Untuk melihat jumlah tenaga kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat dapat dilihat pada tabel 1.3

Tabel 1.3
Penduduk 15 Tahun yang Bekerja
Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2010 - 2013

KAB / KOTA	Tahun				Rata-rata
	2010	2011	2012	2013	
Kab Sambas	247172	243682	250333	239044	245058
Kab Bengkayang	101452	107244	104394	107894	105246
Kab Landak	155545	166984	154709	153836	157769
Kab Pontianak	99501	115073	105990	94279	103711
Kab Sanggau	208039	211152	207653	206249	208273
Kab Ketapang	201116	213042	210621	198678	205864
Kab Sintang	187981	183647	198331	189537	189874
Kab Kapuas Hulu	119142	117053	114458	111252	115476
Kab Sekadau	94625	94365	98276	95866	95783
Kab Melawi	96087	91824	94957	92919	93947
Kab Kayong Utara	44005	47926	43175	44009	44779
Kab Kubu Raya	222405	242130	214083	202320	220235
Kota Pontianak	240576	232118	231801	234840	234834
Kota Singkawang	78059	80332	77733	83100	79806
Kalimantan Barat	2095705	2146572	2106514	2053823	2100654

Sumber: BPS Kal-Bar Statistik Ketenagakerjaan 2010-2013

Berdasarkan tabel 1.3 menunjukkan bahwa pada tahun 2010 sampai dengan 2013 rata-rata jumlah tenaga kerja di Kalimantan Barat selama empat tahun terakhir berjumlah 2.100.654 juta jiwa per tahun. Rata-rata tenaga kerja tertinggi terdapat pada Kabupaten Sambas dengan rata-rata 245.058 ribu jiwa per tahun dan rata-rata tenaga kerja terendah terdapat pada Kabupaten Kayong Utara dengan rata-rata 44.779 ribu jiwa per tahun. Tingginya rata-rata jumlah tenaga kerja per tahun di Kabupaten Sambas mungkin disebabkan oleh semakin meningkatnya jumlah penduduk yang bekerja, sementara jumlah pencari kerja juga terus meningkat. Rendahnya rata-rata jumlah tenaga kerja per tahun di Kabupaten Kayong Utara mungkin disebabkan jumlah penduduk yang bekerja menurun sementara jumlah pencari kerja juga sedikit.

Belanja daerah yang cenderung meningkat setiap tahunnya dan jumlah tenaga kerja yang bekerja terus mengalami fluktuasi, namun pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat belum mengalami kenaikan yang signifikan. Hal ini menimbulkan perhatian untuk diteliti lebih lanjut. Oleh karena itu, penulis tertarik menyusun skripsi yang berjudul **“Pengaruh Belanja Daerah dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Barat” (Studi Kasus 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 – 2013).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang atas maka permasalahan yang akan dibahas adalah :

1. Apakah belanja daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat tahun 2010 – 2013?
2. Apakah tenaga kerja berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat tahun 2010 – 2013?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat tahun 2010 – 2013?
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat tahun 2010 – 2013?

1.4 Kegunaan penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat :

1. Menjadi tolak ukur pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat dalam mengefektifkan belanja daerah dan mutu tenaga kerja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat yang lebih optimal.
2. Menjadi acuan bagi akademisi untuk melakukan penelitian lebih lanjut.